**PENGATURAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DALAM
MEWUJUDKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

**REGULATION OF TRADITIONAL MARKET, SHOOPING
CENTER, AND MODERN RETAIL IN CREATING FAIR
COMPETITION ACCORDING TO POSITIVE LAW OF
INDONESIA**

Hadi Sucipto

POLDA Nusa Tenggara Barat

Email :hadi_polda @yahoo.co.id

Naskah diterima : 20/09/2017; direvisi : 18/12/2017; disetujui : 28/12/2017

Abstract

Mataram City Local Regulation No. 9 of 2015 concerning Public Market, Traditional Market, Shopping Center and Modern Store used the principle: Utility, Justice, Equity, Cooperation, Business honesty, healthy competition and empowering of sustainability community economy. Both of the legal protection in creating fair competition are regulated in Act. No. 5 of 1999, Trade Minister Rule No. 70 of 2013, Mataram City Local Regulation No. 9 of 2015. Government in implementation the regulation must create clear and certainty and avoiding regulation lost of socity related with Traditional Market, Shopping Center, and Retail Modern in creating fair competition. Government must increse supervision over the traditional market, shopping center and retail modern in creating fair competition amoung growing rapidly retail modern that did not follow rules well.

Key words:Competition, Traditional Market, Retail Modern

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, prinsip pengaturan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern menggunakan prinsipnya : kemanfaatan, adil dan merata, kemitraan, kejujuran usaha, persaingan sehat dan memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Kedua perlindungan hukum dalam mewujudkan persaingan usaha antara lain: diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan harus mengeluarkan pelaksanaan yang jelas dan pasti dari setiap kebijakan yang akan dijalankan agar dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat terkait dengan regulasi pengaturan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern

dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat dengan maraknya toko modern berkembang dengan tidak mengikuti aturan.

Kata kunci: *Persaingan, Pasar Tradisional, Toko Modern.*

PENDAHULUAN

Perkembangan toko modern di Indonesia, terutama pedagang pengecer telah merambah wilayah-wilayah pedesaan. Tidak sedikit wilayah pedesaan di Indonesia yang telah menjadi wilayah usaha menjanjikan bagi pedagang eceran modern. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, diterbitkan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi di jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu Apakah prinsip hukum Pengaturan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap pengaturan Pasar Tradisional, Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu di mana penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dan untuk mendapatkan jawaban yang logis maka dilakukan pendekatan secara empiris yang dilakukan dengan wawancara. Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹, Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)². Adapun cara penyimpulan bahan/data hukum Setelah data yang diperoleh sesuai dengan teknik pengumpulan data di atas, maka data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data dan penafsiran hukum yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan alur deduktif, dalam hal ini pola pikir yang mendasari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan ke hal-hal yang bersifat khusus dengan

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II*, Ed.1 Cet.5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2003. hlm 116-117.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Kencana, Jakarta.2008. hlm 96

menggunakan peraturan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan pokok mengenai permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat

Pada Perpres No. 112 tahun 2007 Pasal 1 Ayat (12) telah disebutkan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket dengan pedagang kecil/tradisional minimal 1 (satu) kilo meter, namun pada kenyataannya yang ditemukan di lapangan adalah ritel modern tersebut jaraknya sangat dekat bahkan ada yang bersebelahan dengan pedagang toko/pasar tradisional. Ditambah lagi barang yang dijual oleh toko tradisional pada umumnya sama dengan barang yang dijual pada ritel modern tersebut. Berkembangnya ritel modern tersebut menyebabkan keberadaan toko tradisional semakin tersisih. Terdapat persaingan yang tidak sehat di antara pelaku toko tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial di antara keduanya.

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat), tentunya negara mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya

sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya.³

Menjalankan suatu usaha diperlukan tempat usaha yang tidak bisa lepas dengan lokasi. Pemilihan lokasi usaha memang difokuskan pada tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi orang seperti tempat pariwisata, di sekitar toko, di dekat akses lalu lintas jalan raya, dan sebagainya. Dalam menentukan tempat usaha dipertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas. Lokasi usaha harus mudah dijangkau dan efisien baik oleh pedagang maupun konsumen atau pelanggan. Untuk menentukan lokasi usaha terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih di antaranya, membangun bila ada tempat yang strategis, membeli atau menyewa, ataupun kerjasama bagi hasil jika menguntungkan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja, akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut serta jalan raya. Dalam pemilihan tempat memerlukan perkembangan cermat terhadap beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:⁴

- a. Akses, misalnya tempat mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum
- b. Visibilitas, misalnya tempat mudah dilihat dari tepi jalan. Lalu lintas, (*traffic*), di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu banyaknya orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang besar terjadinya peningkatan penjualan dan kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi hambatan.
- c. Tempat parkir yang luas dan aman

³ Muhammad Fitrah, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (persero) Cabang Bima*, Jurnal IUS, 2015, Vol 2 No. 2, hal 264-265

⁴ Wawancara dengan Pri Agus Satriawan Karyawan Indomart Jln. Sriwijaya Mataram, di Mataram pada tanggal 19 Maret 2017.

- d. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian hari.
- e. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.
- f. Persaingan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.
- g. Peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern⁵. serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007, definisi pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Syarat-syarat Pasar Tradisional Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007, tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, adalah:

- a. Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas,

- b. Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya,
- c. Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana dan
- d. Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya.

Dalam Perpres tersebut juga dibahas tentang penataan pasar tradisional yang menjelaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dalam ketentuan Pasar Tradisional salah satunya adalah wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman.⁶

Dalam hal ini revitalisasi adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pasar tradisional dalam memenuhi ketentuan wajib. Revitalisasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh pasar tradisional dalam persaingan era globalisasi. Banyaknya pasar modern dengan fasilitas yang memadai akan mengurangi peran pasar tradisional.

Revitalisasi dapat dilaksanakan apabila semua pihak yang terkait saling mendukung, baik pihak pemerintah, pedagang hingga pembeli. Aspek fisik, aspek ekonomi serta aspek sosial menjadi perhatian yang utama dalam melaksanakan revitalisasi. Kenyamanan dalam aktivitas ekonomi merupakan target yang ingin dicapai, sehingga diharapkan akan memberi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan

⁵Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern.

⁶Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional

adanya revitalisasi adalah mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa berbelanja di pasar tradisional tidak lagi dianggap ketinggalan zaman.

Berbelanja di pasar tradisional merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap produk diri sendiri serta menguji kemampuan berkomunikasi. Keberadaan pasar tradisional sudah saatnya dilestarikan untuk menunjang pembangunan perekonomian dari masing-masing daerah. Program revitalisasi pasar tradisional digagas dengan maksud menjawab semua permasalahan yang melekat pada pasar tradisional. Penyebabnya, pasar tradisional dikelola tanpa inovasi yang berarti yang mengakibatkan pasar menjadi tidak nyaman dan kompetitif. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi di pasar tradisional, kondisi fisik memegang peranan yang penting. Rancangan fisik pasar harus mempertimbangkan fungsi pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi sosial komunitas penggunanya. Program revitalisasi pasar tradisional juga menyentuh tata kelola (kelembagaan) pasar. Mewujudkan pasar yang profesional haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu di mana seluruh manajemen pasar terintegrasi menjadi satu⁷

Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional merupakan usaha pemerintah agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern. Pembangunan suatu pasar perlu memperhatikan kesejahteraan pedagang maupun pembeli di pasar tersebut. Lewat penataan kembali pasar tradisional yang memperhatikan aspek kenyamanan, pelayanan dan keamanan, maka potensi yang dimiliki pasar tradisional akan dapat

meningkat. Daya saing yang meningkat diharapkan mampu memberi keunggulan komparatif bagi pasar tradisional. Program revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar dan mengaktifkan kembali kegiatan pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern sehingga bukan hanya meningkatkan pendapatan pedagang tapi juga meningkatkan daya saing untuk memperluas pangsa pasar.

Dengan diadakannya program revitalisasi, pasar tradisional siap menyaingi serbuan pasar modern. Pasar tradisional akan kembali dilirik oleh konsumen jika citra buruk yang melekat selama ini dihapuskan. Kuncinya adalah pasar tradisional harus ditata sedemikian rupa sehingga keadaannya menjadi bersih dan nyaman bagi pengunjung termasuk menjaga kualitas kesehatan produk yang dijual. Pemerintah haruslah proaktif untuk menghidupkan kembali pasar tradisional begitu juga dengan para pedagang dan pengelola pasar harus konsisten untuk menjaga aura pasar tradisional untuk kebersihan pasar pasca revitalisasi tetap terjaga disertai juga dengan tata kelola pasar yang professional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 41

1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

⁷A.A Mirah Pradnya ParamitadanA.A Ketut Ayuningsasi, *Efektivitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 5, Mei 2013, [Http://Ojs.Unud.Ac.Id/Diakses](http://Ojs.Unud.Ac.Id/Diakses) Pada Sabtu, 5 Mei 2017, hlm. 235.

- 2) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
 - 3) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/ gerai milik sendiri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 5 (lima) tahun.
 - 4) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko modern sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.
 - 5) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80 % (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, prinsipnya berdasarkan pada Tujuan Pasal 2 Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. manfaat;
 - b. adil dan merata;
 - c. kemitraan;
 - d. kejujuran usaha;
 - e. persaingan sehat; dan
 - f. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- Analisa penulis memperhatikan dari 6 asas yang menjadi prinsip dasar pengelolaan Pasar Tradisional, Toko modern dan Swalayan di Kota Mataram telah dijalankan dengan baik oleh dinas terkait dengan Pasar itu sendiri dan Dinas Perdagangan yang substansinya telah terpenuhi dan terwujud dari seluruh element masyarakat dan tidak ada perbedaan pada instrument pasar tradisional yang ada di Kota Mataram.
- Dari hasil analisis penulis terhadap persaingan sehat; dan persaingan antara pasar tradisional dengan toko modern secara langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-dag/per/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan belum sinkron dan pelaksanaan di Mataram saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan belum maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram sehingga pelaksanaannya bertentangan terkait jarak antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
- Kaidah-kaidah hukum baru yang merupakan hukum ekonomi untuk sebahagian besarnya tidak lagi berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun

hukum publik yang konvensional. Akan tetapi dengan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru timbul pula kaidah-kaidah baru dan pranata-paranata baru yang sulit sekali dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum publik konvensional. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi, hukum bukan saja dipandang sebagai salah satu obyek atau sarana pembangunan, akan tetapi juga berfungsi sebagai suatu penunjang bagi kelangsungan pembangunan, baik dalam memberikan dasar kepastian, alat pengamanan maupun sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan. Jelasnya bahwa hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.⁸

Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Berbagai alasan mungkin akan dilontarkan orang jika ditanya: "Mengapa tidak memilih pasar tradisional?." Dari mulai kondisi pasar yang becek dan bau, malas tawar menawar, faktor keamanan (copet, dsb), risiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Padahal pasar tradisional juga masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pasar modern. Di antaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok.

Bagaimanapun juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Di sana, masih banyak orang yang menggantungkan

hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan. Sudah banyak kios di pasar tradisional yang harus tutup karena sulit bersaing dengan pasar modern.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keberadaan pasar modern. Sudah menjadi sifat konsumen di mana akan lebih senang memilih tempat yang lebih nyaman, barang lebih lengkap dan harga lebih murah, di mana hal tersebut bisa diakomodasi pasar modern. Kunci solusi sebenarnya ada di tangan pemerintah. Harus ada aturan tata niaga yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. Misalnya tentang berapa jumlah hypermarket yang boleh ada untuk setiap wilayah di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan pada pasar tradisional akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan yang sehat antara keduanya. Hal lain yang mungkin perlu dilakukan adalah merubah "wajah" pasar tradisional agar bisa lebih nyaman dan teratur. Sayangnya pembenahan pasar rakyat ini tampaknya sering lebih sering mengedepankan kepentingan investor ketimbang kepentingan para pedagangnya sendiri. Harga kios yang tinggi tanpa kompromi kerap membuat pedagang "alergi" mendengar kata pembenahan. Keadaan ini tidak jarang akhirnya menimbulkan perselisihan antara pedagang lama dengan investor yang ditunjuk pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional.

Perlindungan hukum terhadap pengaturan Pasar Tradisional, Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk

⁸ Muhammad Sood, *Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan Global*, Jurnal IUS, 2013, Vol I No. 1, hal 154.

memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Philipus M. Hadjon ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni:⁹

"Kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukum adalah menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah). Sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap si lemah terhadap si kuat, misalnya. perlindungan bagi buruh terhadap pengusaha".

Berkaitan dengan perlindungan hukum kepada rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah/penguasa, menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas 2 (dua) macam yakni perlindungan preventif dan refresif:¹⁰

"Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan 'untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan refresif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak

karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang refresif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara".

Perlindungan hukum oleh negara/pemerintah lebih ditekankan pada unsur negara/pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah kepada warga negaranya dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan perlindungan preventif, pemerintah telah memberikan saluran melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 53 Undang-undang ini menyebutkan bahwa "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah".

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah asas keterbukaan yakni dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi.

⁹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila Simposium Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum, Lustrum VIII, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 1

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hal. 2-3.

Perlindungan berarti tempat berlindung.¹¹ Blak's Law Dictionary memberikan pengertian *protection* sebagai: (1) tindakan melindungi (*the act of protecting*), (2) proteksionisme (*protectionism*), (3) menutupi (*coverage*), (4) suatu dokumen yang diberikan oleh seorang notaris kepada pelaut atau orang lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri, yang menegaskan pemegangnya adalah warganegara AS (a document given by a notary public to sailors and other persons who travel abroad, certifying that the bearer is a U.S. citizen).¹²

Dalam hukum Inggris *protection* diartikan sebagai suatu hak istimewa yang diberikan raja kepada suatu pihak pada suatu gugat, dengan hak ini dilindungi dari satu putusan yang akan dijatuhkan (Eng. law. A privilege granted by the king to a party to an action, by which he is protected from a judgment which would otherwise be rendered ...)." Dalam perlindungan, terdapat hak yang harus dijaga dan dihormati. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

Satjipto Rahardjo menyebut hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, juga kehendak.¹⁴ Sedangkan menurut James W. Nickel unsur-unsur hak adalah pertama, hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya, kedua, hak adalah untuk suatu kebebasan atau

keuntungan, dan ketiga, suatu hak ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut.¹⁵

Pemerintah menyadari bahwa diberlakukannya Undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha konsumen. Terbitnya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuan yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Peraturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mendukung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

Karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah

¹¹ J.S. Badudu, *Ibid*, hal. 816.

¹² Bryan A. Garner (ed.), *Blak's Law Dictionary*, Eight Edition, A Thomson Business, 2004, hal. 1259.

¹³ Husen Alting, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di NIAuku Utara: Perspektif Dinamika Hukum di Era Otonomi Daerah", Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hal.155.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op., cit*, hal. 94.

¹⁵ James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1987, hal. 19-21.

satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah, harus diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Di dalam Negara hukum, terdapat sendi-sendi pokok yang selalu melekat dan bersifat universal, yaitu :¹⁷

- a. Prinsip tertib Hukum Hukum harus dapat mewujudkan suatu tertib hukum, artinya keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman Hukum Hukum di sini harus mampu mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yakni setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dan status sosial yang berbeda. Pengayoman dan perlindungan hukum dapat diwujudkan bila hukum mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
- c. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban di depan Hukum, Setiap warga Negara secara keberadaan sebagai manusia yang

memiliki persamaan dalam memperoleh rasa keadilan, baik secara hak dan kewajibannya.

- d. Prinsip kesadaran Hukum Kesadaran hukum disini meliputi kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum

Perlindungan terhadap pasar tradisional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional dari persaingan yang tidak sehat sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik layaknya suatu usaha. Sehingga dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan di amati dari aspek; Kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern.

Keberadaan pasar tradisional merupakan wadah bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dalam bidang perdagangan dan memberi peluang usaha yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Kedudukan pasar tradisional tersebut mendapat pembinaan dan perlindungan dari pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya penamaan pasar; tradisional dan modern secara sadar menimbulkan jarak/jurang pemisah antar keduanya yang memiliki konsep nilai yang dibangun berbeda. Namun demikian bila diamati lebih lanjut lahirnya Peraturan Presiden Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Pusat Perbelanjaan kemudian diturunkan kemudian melalui Peraturan

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran Bandung*: Nus Media, 2008, hlm.18.

¹⁷ Sudjono Saukarto, Marmo, *Pengantar Hukum Di Negara Pancasila*, Jakarta: Garuda MetropolisPress, 1997. hlm.18.

Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasal 127 yaitu:

- 1) Perlindungan Pasar Rakyat merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 2) Perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. Memberikan kesempatan yang sarana kepada pedagang untuk memanfaatkan pasar;
 - c. Meningkatkan kesadaran, kemampuan wawasan dan kemandirian pedagang, serta pembinaan manajemen kewirausahaan pedagang;
 - d. Memberikan jaminan usaha atau kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi dan perlindungan standarisasi pelayanan;
 - e. Meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
 - f. Memberikan kenyamanan dan keamanan pasar;
 - g. Memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran, dan
 - h. Fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. Melakukan fasilitasi terhadap UMKM

agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;

- b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan;
- c. Mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/ atau
- d. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melalui Dinas dapat:

- a. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik;
- b. Memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. Fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dengan pemasok; dan/ atau
- d. Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib dilaporkan kepada walikota dan ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap 3 (tiga) bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota. Sedangkan menurut analisa penulis perwujudan persaingan tidak sehat dapat ditekan sedemikian rupa agar tidak merugikan usaha dan mitra usaha dari para pedagang, tentunya perlu langkah-langkah konkret nyata dari Pemerintah Kota Mataram

SIMPULAN

Model Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Pembelajaran dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia yaitu Prinsip pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

menggunakan prinsip manfaat, adil dan merata, kemitraan, kejujuran usaha, persaingan sehat; dan memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kota Mataram saat ini belum maksimal dilaksanakan karena jarak antara pasar tradisional dengan toko modern di Kota Mataram belum sesuai amanat Perpres maupun Permendag, sehingga belum ada sinkronisasi antara Perpres dan Permendag maupun dengan Perda Mataram.

Sementara itu perlindungan hukum terhadap pengaturan pasar tradisional dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan :

- a. Perlindungan Peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
- b. memberikan kesempatan yang sama kepada pedagang untuk memanfaatkan pasar;
- c. meningkatkan kesadaran, kemampuan wawasan dan kemandirian pedagang, serta pembinaan manajemen kewirausahaan pedagang;
- d. memberikan jaminan usaha atau kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi dan perlindungan standarisasi pelayanan;
- e. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
- f. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar;
- g. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran, dan
- h. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana prasarana

maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Muktie Fadjar, 2003, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nus Media, Bandung
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II, Ed.1 Cet.5*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- D' Mutiar'as, 1955, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta
- Hamid S. Attamimi, 2000, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan ke empat UUD 1945* Makalah Simposium Nasional oleh Badan Pembina Hukum Nasional Dept Kum & Ham, Denpasar 14-182007.
- JJH. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Hadjon, Philipus, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan I, Bina Ilmu, Surabaya.
- Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Kencana, Jakarta:

Salman Soemantri, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*, Alumni Bandung

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administratif Negara*, Cetakan I, Alumni, Bandung

Sudjono Saukarto, Marmo, 1997, *Pengantar Hukum Di Negara Pancasila*, Jakarta: Garuda MetropolisPress,

Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Jurnal

Muhammad Sood, *Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan Global*, Jurnal IUS, 2013 Vol I No. 1.

Muhammad Fitrah, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (persero) Cabang Bima*, Jurnal IUS, 2015 Vol 2 No. 2.

Rozi Aprian Hidayat, *Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan*, Jurnal IUS, 2016, Vol IV No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern.

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional